

Judul : DPR Khawatirkan Aspek Hankam Ibu Kota Baru
Tanggal : Jumat, 27 September 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 15

DPR Khawatirkan Aspek Hankam Ibu Kota Baru

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Pemin-dahan Ibu Kota RI memintape-merintah benar-benar mem-perhatikan dan mengkaji lebih dalam lagi aspek pertahanan dan keamanan (hankam) ibu kota baru (IKB) di Pulau Kalimantan.

Wakil Ketua Pansus Pemin-dahan Ibu Kota A Bakri menga-takan, calon IKB di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Ti-mur, berada di pulau yang di-tempati tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Bru-nei Darussalam.

"Kita satu daratan dengan negara tetangga. Harus dianti-sipasi bahwa kita berhadapan dengan negara-negara tetanga-ga. Kita berhadapan dengan ja-lur laut internasional. Berbeda dengan di Jakarta, disekitarnya milik kita," sebut A Bakri se usai rapat kerja dengan Kement-erian Pertahanan, Kement-erian Hukum dan HAM, Kement-erian PAN-RB, Kement-erian Dalam Negeri, Polri, serta TNI untuk membahas lanjutan kajian pemindahan ibu kota negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bakri mengingatkan, jangan sampai ketika ibu kota negara pindah, keamanan dan per-tahanannya tidak dikuasai. Kendati demikian dia meng-apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang telah memaparkan hasil-hasil kajian pertahanan dan keamanan dari sisi darat, laut maupun udara.

Politikus PAN itu juga me-mandang pemerintah harus menguasai berbagai teknologi militer yang canggih untuk mempersiapkan pertahanan dan keamanan di ibukota baru. Terlebih konsep ibu kota baru nanti adalah *smart city* yang



Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (dua kiri) bersama (kiri ke kanan) anggota Pansus Ibu Kota Baru Johnny G Plate, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie, dan Dirjen HKN Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam diskusi bertema "Mengukur Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara RI" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

berarti mengedepankan tek-nologi digital dalam setiap aspek pembangunan maupun keberlangsungan kota.

Sementara itu anggota Pan-sus dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, meminta pe-merintah mempertimbangkan kembali rencana luas wilayah ibu kota baru yang direncana-kan mencapai 180.000 hektare.

"Ibu kota negara tidak boleh terlalu luas karena untuk men-jaga aspek keamanan tadi. Se-makin tidak luas, semakin mu-dah sistem keamanannya," ujarnya.

Bambang mengusulkan luas ibu kota baru tidak lebih dari 5.000 hektare. Menurut dia, luas ibukota yang diperkecil dari rencana awal juga berdampak pada lahan produktif di sana yang bisa dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi negara.

Sekretaris Jenderal Kement-erian Pertahanan Agus Setiadji menerangkan, parameter pe-mindahan ibukota yang dilaku-kan pihaknya adalah melin-

dungi dan menjaga kedaulatan wilayah negara serta keselamat-an segenap bangsa.

Kementerian Pertahanan sudah berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memenuhi parameter terse-but. "Dari aspek personel, kami mengikuti Kementerian PAN-RB. Kemhan juga sudah meng-kaji aspek-aspek keamanan ibu kota yang harus dipenuhi ber-sama mabes TNI," kata Agus.

Mabes TNI memproyeksi 5.737 personel TNI akan pindah tugas ke Mabes TNI di ibu kota baru. Sebanyak 506 prajurit TNI antara lain berasal dari satuan Pusat Pembinaan Mental (Pus-bintal), Pusat Kesehatan (Pus-kes), Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Badan Peimbekalan (Babek), Pusat Keuangan (Pus-ku), dan Satuan Siber.

"Tidak semua prajurit di Ja-karta direlokasi ke Kalimantan Timur. Terdapat juga satuan TNI di luar Mabes TNI yang diren-canakan mengisi Mabes TNI," kata Kepala Staf Umum (Kasum)

TNI Letjen Joni Supriyanto.

Sementara itu 626 personel Mako Akademi TNI, 447 perso-nel Sesko TNI, 157 personel Pusjarah TNI, 1.779 personel Bais TNI, dan 419 personel Ko-gartap I tetap tinggal menem-pati satuan lama. Lainnya ada-lah 279 personel Kogartap II, 3.441 personel Kogartap III, 230 personel PMPP TNI, 52 personel Pusjianstra TNI, 577 personel Kodiklat TNI, 291 personel Koopsus TNI, 268 personel Paspampres Grup D, dan 13 personel LF TNI Mabes.

Mabes TNI rencananya akan berlokasi di Kutai Karta-negara, Kalimantan Timur, bersama Balakpus TNI, insta-lasi militer, dan rumah sakit integratif TNI tipe A. Adapun Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kementerian atau lembaga negara, gedung kedu-taan, kantor perwakilan Pang-lima TNI dan markas angkatan serta Paspampres Grup A, B, dan C di Penajam Paser Utara.

● **abdul rochim/sindonews**